

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kebijakan Konsep *Smart City* di Kota Makassar

Level Of Public Participation in Realizing Smart City Concept Policies in Makassar City

Anggi Azizah Mas*, Murshal Manaf, Rudi Latief

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

*Email: anggiazizahmas@gmail.com

Diterima: 12 Januari 2024/Disetujui 30 Juni 2024

Abstrak. Sebagai kota metropolitan dan pusat pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar telah berupaya menerapkan konsep *Smart City* guna meningkatkan mutu pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Meskipun kebijakan ini telah diterapkan selama lebih dari sepuluh tahun, dampaknya masih belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Padahal salah satu dimensi penting dalam *Smart City* adalah *Smart People* atau keterlibatan masyarakatnya dan bagaimana mereka mendapat manfaat dari *Smart City*. Sehingga didapatkan hipotesis bahwa masyarakat belum banyak dilibatkan dan harus dilihat pada tingkat mana keterlibatannya agar dapat dikaji lebih lanjut upaya peningkatannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan *Smart City*. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui penilaian skoring partisipasi dengan dasar Teori Arnstein terkait tingkat partisipasi masyarakat. Dari hasil analisis skoring, diketahui bahwa tingkat keterlibatan masyarakat masih berada pada tingkat rendah, yakni dalam kategori *non-participation*, dimana pelibatan warga hanya terbatas pada bentuk partisipasi simbolik seperti konsultasi atau pemberian informasi sepihak. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan *Smart City* tidak cukup ditentukan oleh penggunaan teknologi dalam acara pemerintah semata, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan sejauh mana mereka dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih menargetkan masyarakat sebagai objek.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Dimensi *Smart City*, Kota Makassar

Abstract. As a metropolitan city and centre of government in South Sulawesi Province, Makassar City has attempted to implement the *Smart City* concept to improve the quality of public services based on information technology. Although this policy has been implemented for more than ten years, its impact has not been felt in real terms by the community. Whereas one of the important dimensions in *Smart City* is *Smart People* or community involvement and how they benefit from *Smart City*. So it is hypothesized that the community has not been involved much and must be seen at what level of involvement it is so that efforts to improve it can be further studied. This study examines the extent to which the community is involved in implementing the *Smart City* policy. The study was conducted with a quantitative approach through a participation scoring assessment based on Arnstein's Theory related to the level of community participation. From the results of the scoring analysis, it is known that the level of community involvement is still at a low level, namely in the *non-participation* category, where citizen involvement is only limited to symbolic forms of participation such as consultation or provision of unilateral information. Overall, these findings confirm that the success of the *Smart City* policy is not determined by the use of technology in government events alone, but is also greatly influenced by the extent to which the community is actively involved in the planning and implementation of activities that target the community as an object.

Keywords: Community Participation, *Smart City* Dimension, Makassar City



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan meningkat pesat, sementara ketersediaan lahan tetap terbatas—menciptakan kompleksitas dalam pengelolaan kota. Saat ini, sekitar 50% populasi dunia tinggal di kota, dan diperkirakan akan mencapai hampir 70% pada tahun 2050–2060. (Kundu & Pandey, 2020) Situasi ini menuntut solusi berkelanjutan dan efisien agar kualitas hidup dan pelayanan publik tetap terjaga. Salah satu strategi yang

banyak diadopsi adalah pengembangan *Smart City*, yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, pelayanan, dan manajemen sumber daya kota (El-Sherif & Khalil, 2022).

Smart City sendiri didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan teknologi digital untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menciptakan ruang urban yang adaptif, inklusif, dan inovatif. Melalui integrasi data kota, warga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam perumusan dan penyelesaian masalah lokal,

mempercepat pencapaian kualitas hidup yang lebih baik (Martynova, 2020). Namun, teknologi semata tidak cukup—peran masyarakat menjadi kunci keberhasilan Smart City.

Di Indonesia, komitmen menuju Smart City diwujudkan melalui program “Gerakan Menuju 100 Smart City” sejak 2017. Program ini melibatkan berbagai lembaga seperti Kemkominfo, Kemendagri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Presiden, bertujuan mempercepat pembangunan kota cerdas di berbagai dimensi—termasuk Smart Governance, Smart Living, Smart Environment, Smart Society, Smart Economy, dan Smart Branding (Erza et al., 2022). Dari keenam dimensi tersebut, Smart Society atau Smart People menjadi fundamental karena menekankan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan kota cerdas. (Rodríguez Bolívar et al., 2022)

Partisipasi masyarakat dalam Smart City meliputi kolaborasi digital melalui aplikasi, forum daring, deliberasi publik, dan co-creation bersama pemerintah, demi solusi kota yang lebih responsif dan tepat sasaran (Simonofski et al., 2021; von Benz, 2024). Sayangnya, di banyak kota di Indonesia partisipasi masyarakat masih dijalankan secara top-down, sehingga jarang terjadi dialog interaktif antara pemerintah dan warga, yang berpotensi menyebabkan kebijakan tidak sejalan dengan kebutuhan nyata.

Kota Makassar, dengan visi “Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua” sejak 2014, merupakan salah satu kota perintis implementasi Smart City berbasis perilaku lokal, seperti nilai budaya sombere—ramah, peduli, dan terbuka (Saputra et al., 2022). Meski program ini sudah berjalan dua kali masa jabatan, akses dan persepsi warga masih beragam—penyebabnya meliputi kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses TIK, dan rendahnya kesadaran akal partisipatif. (Wahyuni et al., 2022)

Secara empiris, efektivitas Smart City sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi publik yang tinggi mendukung transparansi, akuntabilitas, dan akseptasi kebijakan. (Nyaranga et al., 2022) Namun, studi menunjukkan bahwa kesenjangan adopsi layanan Smart City masih terjadi di antara kelompok masyarakat, tergantung tingkat literasi digital, pendidikan, dan akses sosial-ekonomi. (Jang & Gim, 2022; Cai et al., 2023)

Berangkat dari latar ini, penelitian ini bertujuan mengukur dan memahami tingkat partisipasi masyarakat Kota Makassar dalam mendukung implementasi Smart City. Analisis meliputi aspek digital engagement, keterlibatan dalam co-creation, serta persepsi masyarakat terhadap manfaat Smart City. Temuan diharapkan menjembatani kesenjangan partisipasi sosial, memberikan rekomendasi strategi inklusif, dan memperkuat fondasi Smart Society agar program kota cerdas benar-benar berorientasi pada kebutuhan warganya.

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah pertama dan kedua di proposal tesis ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni pendekatan pengolahan data, analisis, hingga hasilnya menggunakan pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada proposal ini bertempat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei sebagai metode pengumpulan data utama. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang representatif mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan Smart City. Responden penelitian adalah warga Kota Makassar yang berusia minimal 17 tahun dan memiliki pemahaman dasar terkait penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik kota. Pemilihan responden dilakukan berdasarkan prinsip representativitas dan keterjangkauan, serta mempertimbangkan distribusi demografis wilayah kota.

Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan pendekatan Maximum Likelihood Estimation (MLE), yang secara umum merekomendasikan ukuran sampel yang memadai berada pada rentang 100 hingga 200 untuk mencapai kestabilan parameter dalam model analisis. (Pate et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan ukuran sampel minimal sebanyak 100 responden, dengan target maksimal sebanyak 200 responden. Rentang ini dinilai cukup memadai untuk memberikan hasil yang akurat dan dapat digeneralisasi secara proporsional terhadap populasi urban di Kota Makassar.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks ini, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan rasional—yakni warga yang berdomisili di Kota Makassar dan memiliki pengalaman dalam mengakses atau menggunakan layanan publik berbasis digital yang disediakan oleh pemerintah kota. Teknik ini umum digunakan dalam studi kebijakan publik dan riset partisipatif karena memungkinkan peneliti mendapatkan informasi dari responden yang benar-benar relevan terhadap topik penelitian. (Cheah et al., 2023)

Kuesioner yang digunakan sebagai instrumen pengumpulan data dikembangkan berdasarkan dimensi partisipasi masyarakat dalam konteks Smart City, seperti keterlibatan dalam forum daring, pelaporan masalah kota, dan tingkat pemanfaatan aplikasi pelayanan publik. Validitas isi instrumen diuji melalui proses expert

judgment, sementara reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's Alpha untuk memastikan konsistensi internal antar item. Pendekatan ini sejalan dengan praktik ilmiah dalam studi partisipasi warga negara dalam tata kelola kota digital. (Legard, 2022).

Pada riset ini, tolak ukur pengambilan sampel ditentukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Telah bermukim di Kota Makassar lebih dari 10 tahun
2. Berusia minimal 18 tahun
3. Pendidikan terakhir SMA/sederajat

d. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat sampai mana tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebijakan konsep *Smart City* di Kota Makassar. Dimana menurut Teori Arnstein tingkat partisipasi masyarakat terbagi dalam urutan berikut.

1. Non-Partisipasi
 - a) Manipulasi (Manipulation)
 - b) Terapi (Therapy)
2. Tokenisme
 - a) Pemberian Informasi (Informing)
 - b) Konsultasi (Consultation)
 - c) Penentraman (Placation)
3. Kekuatan Warga (Citizen Power)
 - a) Kemitraan (Partnership)
 - b) Delegasi Kekuasaan (Delegated Power)
 - c) Kendali Warga (Citizen Control)

e. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dengan metode:

1. Observasi

Metode pengumpulan data ini berupa pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan tentang objek penelitian yaitu partisipasi masyarakat. Seluruh variabel dalam penelitian dapat dilihat sekilas melalui metode observasi.

2. Kuesioner

Metode pengumpulan data ini berupa daftar pernyataan yang telah disiapkan dan diberikan pada masyarakat terkait dengan partisipasi masyarakat.

f. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan Smart City di Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang telah atau sedang berinteraksi dengan layanan digital publik kota. Instrumen kuesioner dikembangkan berdasarkan kerangka Ladder of Citizen Participation yang diperkenalkan oleh beberapa peneliti, yang mengklasifikasikan partisipasi ke dalam

delapan jenjang, mulai dari non-participation hingga citizen control (Sundberg & Gidlund, 2022). Model ini masih relevan digunakan dalam studi partisipasi masyarakat di era digital, terutama dalam konteks perencanaan kota cerdas. (Prastyo et al., 2022)

Kuesioner tersebut berisi sejumlah item yang mengukur dimensi partisipasi warga, seperti: bentuk keterlibatan yang dilakukan, persepsi terhadap keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, sejauh mana partisipasi tersebut berdampak terhadap kebijakan yang diambil, serta hambatan yang mereka hadapi dalam berpartisipasi. Penyusunan butir pertanyaan juga memperhatikan validitas isi dan kejelasan semantik, dan diuji melalui expert judgment sebelum digunakan secara luas. Teknik ini lazim digunakan dalam penelitian partisipatif berbasis survei dalam konteks tata kelola kota digital. (Pahlavani, 2022)

Untuk mengukur respon dari kuesioner, peneliti menggunakan skala Likert lima poin, yang berkisar dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju". Skala ini memungkinkan peneliti mengukur sikap, opini, dan persepsi secara kuantitatif, serta mengidentifikasi tingkat kecenderungan partisipatif masyarakat. Skoring data dilakukan dengan menjumlahkan nilai pada tiap indikator, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan distribusi dan intensitas partisipasi. Analisis ini membantu menginterpretasi pola partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan Smart City, serta sejauh mana mereka merasa menjadi bagian dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. (Kedra et al., 2023).

Tabel 1. Skor Skala Licker

Pernyataan/Pertanyaan	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Kurang Setuju	2
Tidak Setuju	1

Sumber: Data Skor Skala Licker Sugiyono, 2011.

Setelah menentukan skala licker peneliti mengukur tingkat partisipasi warga masyarakat Makassar dengan menggunakan tangga partisipasi arstein yang terdiri dari 8 tingkatan partisipasi yaitu Manipulation, Therapy, Informing, Consultation, Placation, Partnership, Delegated Power, dan Citizen Control. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap masing-masing indikator diwakili sebagai persentase dari jawaban yang diberikan.

Tabel 2. Level Partisipasi Masyarakat

Level	Penjelasan
<i>Manipulation</i>	Yaitu pelaksanaan rencana pembangunan dalam musrenbang yang tidak sesuai dengan realisasi dimasyarakat.
<i>Therapy</i>	Yaitu penyampaian informasi perencanaan pembangunan kepada wakil masyarakat tanpa adanya umpan balik.
<i>Informing</i>	Dalam tahap ini pemerintah melakukan sosialisasi perencanaan pembangunan kepada masyarakat,

Level	Penjelasan
<i>Consultation</i>	namun hanya sebagai formalitas penyampaian informasi.
<i>Placation</i>	Dalam tahap ini pemerintah berunding dengan masyarakat. Saran dari masyarakat ditampung oleh pemerintah namun keputusan akhir ditentukan oleh pemerintah.
<i>Partnership</i>	Dalam tahap ini pendapat, saran dan kritik dari masyarakat diterima oleh pemerintah, namun pelaksanaan program pembangunan tetap dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya.
<i>Delegated</i>	Pada tahap ini pemerintah menjadikan masyarakat sebagai partner kerja untuk berunding serta bekerjasama dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan.
<i>Power</i>	Pada tahap ini pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat dalam menentukan keputusan perencanaan pembangunan.

Sumber: Teori Arnstein

Kemudian, tangga partisipasi Arnstein disusun berdasarkan wewenang dan tanggung jawab, yang menunjukkan kategori tingkat kualitas partisipasi, seperti:

Tabel 2. Tingkat Kualitas Partisipasi

Tingkat Pembagian Kekuasaan	Ukuran Tingkat Partisipasi
Non-Participation	Rendah
Tokenisme	Sedang
Citizen Power	Tinggi

Sumber: Teori Arnstein

Tabel 3. Interval Skor Variabel

Interval Skor Ideal	Tingkat Partisipasi	Skor Hasil Gabungan
0-170	Sangat Rendah	-
171-340	Rendah	-
341-510	Netral	-
511-680	Tinggi	-
680>	Sangat Tinggi	-
Presentase skor gabungan hasil penelitian terhadap skor gabungan ideal		$\frac{\text{Skor Hasil Gabungan}}{680} \times 100$

Sumber: Teori Arnstein

Hasil dan Pembahasan

1. Variabel X₁ (*Manipulation*)

Berikut tabel hasil dari kuesioner yang telah dibagikan dan skoring skala licker pada pertanyaan pertama dengan variabel X₁ (*Manipulation*).

Tabel 5. Hasil Kuesioner Variabel X₁ (*Manipulation*) dan Skoring Skala Licker

X ₁ = <i>Manipulation</i>	Hasil Kuesioner	Skor Skala Licker	Total Skor Skala Licker
Berjalan dengan Sangat Baik	7	5	35
Berjalan dengan Baik	14	4	56
Netral	37	3	111
Tidak Berjalan dengan Baik	29	2	58
Tidak Berjalan Sama Sekali	13	1	13
Jumlah	100	-	273

Sumber: Hasil Kuesioner Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, pertanyaan pertama pada kuesioner dengan variabel X₁ (*Manipulation*) yang berisi pertanyaan untuk mengetahui pendapat masyarakat terkait

sebaik apa berjalannya penerapan kebijakan konsep *Smart City* di Kota Makassar, terlihat bahwa:

- Sebanyak 7% responden menilai bahwa penerapan kebijakan *Smart City* di Makassar berjalan sangat baik, menghasilkan skor 35. Hal ini menunjukkan masih minimnya penilaian masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan *Smart City*.
- Sebanyak 14% responden menilai bahwa penerapan kebijakan *Smart City* berjalan cukup baik, menghasilkan skor 56. Penilaian ini menambah nilai positif pada pandangan masyarakat terkait efektivitas penerapan kebijakan *Smart City*, walau relatif kecil.
- Sebanyak 37% responden atau mayoritas dari responden bersikap netral, yang berarti sebagian besar masyarakat merasa belum yakin atau tidak memiliki informasi yang cukup sehingga menilai bahwa penerapan kebijakan *Smart City* di Makassar berjalan biasa saja, menghasilkan skor 111.
- Sebanyak 29% responden atau mayoritas kedua dari responden menilai bahwa penerapan kebijakan *Smart City* di Makassar tidak berjalan dengan baik, menghasilkan skor 58. Sebagian besar masyarakat lainnya menganggap efektivitas penerapan kebijakan *Smart City* belum optimal sehingga memilih penerapannya tidak berjalan dengan baik.
- Sebanyak 13% responden menilai bahwa kebijakan *Smart City* di Kota Makassar tidak dijalankan sama sekali, menghasilkan skor 13. Lebih dari 10% masyarakat menilai efektivitas penerapan kebijakan *Smart City* tidak berjalan sama sekali.

Dengan mayoritas suara pertama dan kedua pada responden menunjukkan hasil biasa saja dan cenderung menilai tidak berjalan dengan baik, maka mayoritas dari responden menganggap bahwa penerapan kebijakan *Smart City* di Kota Makassar masih kurang berjalan dengan baik. Sebagian besar masyarakat memiliki pandangan negatif dan masih kurang puas terhadap penerapan dari kebijakan *Smart City*.

Yang berarti, dengan total skor sebanyak 273 atau rendah dalam skala licker tingkat partisipasi, maka secara umum persepsi masyarakat terhadap variabel X₁ (*Manipulation*) atau pelaksanaan penerapan kebijakan *Smart City* menunjukkan bahwa penerapan kebijakan *Smart City* masih perlu ditingkatkan bentuk dan hasilnya secara nyata kepada masyarakat, dan masih perlu peningkatan dari sisi manipulasi kebijakan, strategi penyampaian, penyuluhan dan pelibatan masyarakat.

2. Variabel X₂ (*Therapy*)

Berikut tabel hasil dari kuesioner yang telah dibagikan dan skoring skala licker pada pertanyaan pertama dengan variabel X₂ (*Therapy*).

Tabel 6. Hasil Kuesioner Variabel X₂ (*Therapy*) dan Skoring Skala Licker

X ₂ = <i>Therapy</i>	Hasil Kuesioner	Skor Skala Licker	Total Skor Skala Licker
Sangat Sering	4	5	20
Sering	17	4	68
Netral	48	3	144
Pernah Sekali	15	2	30
Tidak Pernah		1	
Sama Sekali	16		16
Jumlah	100	-	278

Sumber: Hasil Kuesioner Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, pertanyaan kedua pada kuesioner dengan variabel X₂ (*Therapy*) yang berisi pertanyaan untuk mengetahui apakah masyarakat pernah mendengar informasi terkait penerapan kebijakan konsep *Smart City* di Kota Makassar, terlihat bahwa:

- Sebanyak 4% responden menilai bahwa penyampaian informasi dari pemerintah terkait kebijakan *Smart City* sangat sering terdengar, menghasilkan skor 20. Berarti masih sangat sedikit masyarakat yang pernah mendengar informasi terkait *Smart City* di Kota Makassar.
- Sebanyak 17% responden menilai penyebaran informasi terkait *Smart City* sering terdengar, dengan total skor 68. Berarti informasi masih terbatas di tingkat maksimal pertama dan kedua.
- Sebanyak 48% atau setengah dari jumlah responden memilih netral terhadap penyebaran informasi terkait *Smart City*, dengan skor 144. Hal ini berarti sebagian besar masyarakat merasa ragu apakah pernah mendengar atau tidak terkait kebijakan *Smart City* di Kota Makassar.
- Sebanyak 15% dari responden merasa pernah sekali mendengar informasi terkait *Smart City*, dengan skor 30. Yang berarti keterulangan informasi atau sosialisasi dari pemerintah masih minim.
- Sebanyak 16% responden merasa tidak pernah sekalipun mendengar informasi terkait kebijakan *Smart City* di Kota Makassar. Berarti ada indikasi serius sangat kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat.

Dengan setengah dari total responden menilai ragu-ragu atau merasa tidak yakin pernah mendengar informasi terkait penerapan kebijakan *Smart City* di Kota Makassar, 30% lainnya merasa tidak pernah mendengar infomasi, dan hanya total 20% yang merasa pernah mendengar informasi, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Makassar belum memiliki pemahaman atau informasi yang jelas mengenai penerapan kebijakan *Smart City*.

Hal ini ditunjukkan juga dengan total skor skala licker sebesar 278 yang tergolong rendah dalam tingkatan partisipasi. Nilai ini mengindikasikan bahwa tingkat paparan informasi atau komunikasi kebijakan *Smart City* kepada masyarakat masih tergolong rendah atau belum optimal. Sehingga pemerintah seharusnya memperbaiki penyebaran informasi, komunikasi publik, edukasi, dan sosialisasi kebijakan agar masyarakat lebih sadar dan terlibat dalam kebijakan *Smart City* di Kota Makassar.

3. Variabel X₃ (*Informing*)

Berikut tabel hasil dari kuesioner yang telah dibagikan dan skoring skala licker pada pertanyaan pertama dengan variabel X₃ (*Informing*).

Tabel 7. Hasil Kuesioner Variabel X₃ (*Informing*) dan Skoring Skala Licker

X ₃ = <i>Informing</i>	Hasil Kuesioner	Skor Skala Licker	Total Skor Skala Licker
Sangat Sering	11	5	55
Sering	10	4	40
Netral	31	3	93
Pernah Sekali	34	2	68
Tidak Pernah		1	
Sama Sekali	14		14
Jumlah	100	-	270

Sumber: Hasil Kuesioner Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, pertanyaan kedua pada kuesioner dengan variabel X₃ (*Informing*) yang berisi pertanyaan untuk mengetahui apakah masyarakat pernah mendengar sosialisasi terkait kebijakan konsep *Smart City* di Kota Makassar, terlihat bahwa:

- Sebanyak 11% responden merasa sering mendengar sosialisasi terkait *Smart City* di Kota Makassar, dengan skor 55. Artinya hanya sebagian kecil dari responden yang sering mendengar sosialisasi.
- Sebanyak 10% responden yang merasa pernah mendengar sosialisasi, dengan skor 40. Yang berarti jika menjumlahkan hasil sangat sering dan sering menjadi sebanyak 21%, total paparan positif secara umum masih rendah, jumlah masyarakat yang pernah mendengar sosialisasi terkait *Smart City* di Kota Makassar masih sedikit.
- Sebanyak 31% responden memilih netral, dengan skor 93. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden merasa tidak pasti, belum pernah mendengar sosialisasi, atau sosialisasi dirasa kurang berkesan dan tidak jelas.
- Sebanyak 34% atau sebagian besar dari responden merasa pernah mendengar sekali sosialisasi, dengan total skor 68. Artinya sebagian besar masyarakat hanya sekali pernah mendengar sosialisasi terkait *Smart City* dan belum cukup untuk pemahaman penuh.

Sebanyak 14% responden menyatakan belum pernah sama sekali mendengar sosialisasi terkait *Smart City*,

dengan skor 14.. Hal ini menandakan masih ada kelompok masyarakat yang belum pernah sama sekali teersentuh sosialisasi terkait Smart City di Kota Makassar.

Dengan 34% responden atau sebagian besar masyarakat menunjukkan hasil netral atau biasa saja dan tidak yakin pada penilaian terkait pernah atau tidak mendapat sosialisasi terkait Smart City di Kota Makassar dan sebagian masyarakat lain hanya pernah mendengar sekali bahkan tidak pernah terkait sosialisasi, hal ini menunjukkan sosialisasi pemerintah terkait Smart City masih kurang dan belum merata.

Dari variabel X3 (Informing) terkait sosialisasi pemerintah mengenai kebijakan Smart City di Kota Makassar berdasarkan hasil kuesioner dan analisis skala licker, dengan skor 270, disimpulkan tingkat keberhasilan sosialisasi pemerintah masih tergolong rendah. Sehingga terdapat kebutuhan mendesak bagi pemerintah perlu melakukan peningkatan strategi sosialisasi, seperti menggunakan media sosial, seminar, penyuluhan langsung, untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait kebijakan Smart City di Kota Makassar.

4. Variabel X4 (Consultation)

Berikut tabel hasil dari kuesioner yang telah dibagikan dan skoring skala licker pada pertanyaan pertama dengan variabel X4 (Consultation).

Tabel 8. Hasil Kuesioner Variabel X4 (Consultation) dan Skoring Skala Licker

X ₄ =(Consultation)	Hasil Kuesioner	Skor Skala Licker	Total Skor Skala Licker
Sangat Sering	3	5	15
Sering	5	4	20
Netral	37	3	111
Pernah Sekali	10	2	20
Tidak Pernah Sama Sekali		1	
Jumlah	100	-	211

Sumber: Hasil Kuesioner Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, pertanyaan keempat pada kuesioner dengan variabel X₄ (Consultation) yang berisi pertanyaan untuk mengetahui apakah masyarakat pernah diundang pemerintah setempat untuk memberikan masukan atau saran terkait kebijakan konsep “Smart City” di Kota Makassar, terlihat bahwa:

- a) Sebanyak 3% dari responden menjawab sangat sering, dengan skor 15. Yang berarti sangat sedikit dari masyarakat yang merasa pernah terlibat dan diundang pemerintah untuk membahas kebijakan Smart City di Kota Makassar.
- b) Sebanyak 5% responden menjawab sering, dengan skor 20. Berarti hanya sedikit juga masyarakat yang pernah diundang pemerintah untuk memberi masukan terkait kebijakan Smart City di Kota Makassar.
- c) Sebanyak 37% responden atau dengan nilai 111 memilih netral. Artinya banyak masyarakat merasa tidak terlibat ataupun merasa tidak secara

langsung diikutkan oleh pemerintah untuk memberi masukan terkait kebijakan Smart City di Kota Makassar.

- d) Sebanyak 10% responden menjawab pernah sekali, dengan skor 20. Yang berarti sedikit masyarakat pernah merasa terlibat sekali oleh pemerintah dalam memberi masukan dan saran terkait Smart City di Kota Makassar.
- e) Sebanyak 45% atau setengah dari responden menjawab tidak pernah sama sekali, dengan skor 45. Hal ini berarti sebagian besar masyarakat merasa tidak pernah sama sekali dilibatkan oleh pemerintah dalam memberi masukan dan saran terkait kebijakan Smart City di Kota Makassar.

Dengan setengah dari responden menjawab tidak pernah sama sekali dilibatkan, maka mayoritas dari masyarakat cenderung merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam diskusi atau konsultasi mengenai kebijakan Smart City. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terkait kebijakan Smart City masih tergolong rendah dengan total skor 211.

Karena masyarakat cenderung merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam diskusi atau konsultasi mengenai kebijakan Smart City, hal ini mengindikasikan pemerintah Kota Makassar masih belum secara optimal melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan atau saran mengenai implementasi kebijakan Smart City. Kurangnya keterlibatan ini bisa menjadi tantangan dalam komunikasi dan partisipasi publik yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Kota Makassar. Pemerintah perlu meningkatkan forum diskusi, undangan publik, atau konsultasi sebagai upaya memperkuat implementasi Smart City agar lebih inklusif dan partisipatif.

5. Variabel X₅ (Placation)

Berikut tabel hasil dari kuesioner yang telah dibagikan dan skoring skala licker pada pertanyaan pertama dengan variabel X₅ (Placation).

Tabel 9. Hasil Kuesioner Variabel X₅ (Placation) dan Skoring Skala Licker

X ₅ = (Placation)	Hasil Kuesioner	Skor Skala Licker	Total Skor Skala Licker
Sangat Sering	2	5	10
Sering	4	4	16
Netral	23	3	69
Pernah Sekali	31	2	62
Tidak Pernah	40	1	40
Sama Sekali			
Jumlah	100	-	197

Sumber: Hasil Kuesioner Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, pertanyaan kedua pada kuesioner dengan variabel X₄ (Consultation) yang berisi pertanyaan untuk mengetahui apakah masyarakat pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang terkait dengan kebijakan konsep “Smart City” di Kota Makassar, terlihat bahwa:

- a) Sebanyak 2% responden memilih sangat sering dengan skor 10. Berarti sangat kecil jumlah masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam kegiatan Smart City di Kota Makassar.
- b) Sebanyak 4% responden memilih sering dengan skor 16. Walau jumlahnya sebanyak 6% bila ditotal dengan responden sangat sering, tetapi nilai jumlah masyarakat yang pernah terlibat dalam kegiatan Smart City masih sangat sedikit.
- c) Sebanyak 23% responden menjawab netral dengan skor 69. Responden ini cenderung tidak yakin apakah pernah terlibat dalam kegiatan Smart City di Kota Makassar, walau jumlahnya lebih dari 20%, jawaban netral ini masih mengindikasikan masyarakat yang belum paham terkait program Smart City di Kota Makassar.
- d) Sebanyak 31% responden menjawab pernah sekali terlibat, dengan skor 62. Jumlah ini menunjukkan masyarakat yang pernah terlibat namun hanya simbolik atau sekali dalam Smart City di Kota Makassar, jumlah ini masih menunjukkan partisipasi yang minim.
- e) Sebanyak 40% responden menjawab tidak pernah sama sekali, dengan skor 40. Jumlah ini menunjukkan masyarakat mayoritas tidak pernah terlibat dalam kegiatan Smart City di Kota Makassar.

Dengan mayoritas dari responden dan nilai skala licker terbesar ada pada jawaban netral, pernah sekali, dan tidak pernah sama sekali, hal ini menunjukkan pada variabel placation atau keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan Smart City di Kota Makassar masih lemah atau masyarakat masih minim terlibat.

Karena masyarakat masih minim terlibat hal ini menjadi indikator penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi ulang strategi program dan komunikasi kebijakan Smart City di Kota Makassar agar semakin tinggi partisipasi masyarakat.

6. Variabel X₆ (*Partnership*)

Berikut tabel hasil dari kuesioner yang telah dibagikan dan skoring skala licker pada pertanyaan pertama dengan variabel X₆ (*Partnership*).

Tabel 10. Hasil Kuesioner Variabel X₆ (*Partnership*) dan Skoring Skala Licker

X ₆ - (<i>Partnership</i>)	Hasil Kuesioner	Skor Skala Licker	Total Skor Skala Licker
Sangat Sering	2	5	10
Sering	7	4	28
Netral	42	3	126
Pernah Sekali	3	2	6
Tidak Pernah		1	
Sama Sekali	46		46
Jumlah	100	-	216

Sumber: Hasil Kuesioner Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, pertanyaan kedua pada kuesioner dengan variabel X₆ (*Partnership*) yang berisi

pertanyaan untuk mengetahui apakah masyarakat pernah menjadi partner pemerintah dalam bekerja sama mewujudkan kebijakan konsep “Smart City” di Kota Makassar, terlihat bahwa:

- a) Sebanyak 2% responden menjawab sangat sering dengan skor 10. Artinya hanya sedikit dari responden yang pernah terlibat aktif dan rutin sebagai mitra atau partner pemerintah dalam mewujudkan Smart City di Kota Makassar.
- b) Sebanyak 7% responden menjawab sering dengan skor 28. Yang berarti sedikit dari responden yang pernah terlibat walau tidak terus-menerus sebagai partner pemerintah dalam kebijakan Smart City.
- c) Sebanyak 42% responden menjawab netral dengan skor 126. Hampir sebagian responden tidak merasa terlibat secara aktif maupun tidak aktif sebagai mitra pemerintah dalam Smart City.
- d) Sebanyak 3% responden menjawab pernah sekali dengan skor 6. Sedikit dari responden merasa pernah terlibat sekali sebagai mitra pemerintah dalam Smart City.
- e) Sebanyak 46% responden menjawab tidak pernah sama sekali dengan skor 46. Sebagian besar responden merasa belum pernah dilibatkan ataupun terlibat langsung sebagai mitra pemerintah dalam kebijakan Smart City di Kota Makassar.

Dengan mayoritas dari jawaban responden adalah tidak pernah sama sekali dan netral, maka keterlibatan masyarakat sebagai mitra atau partner pemerintah dalam mewujudkan kebijakan Smart City masih rendah, hal ini juga dibuktikan dengan total skor skala licker 216 yang masuk dalam kategori rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Smart City di Kota Makassar masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi ini mencerminkan adanya hambatan dalam komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah belum sepenuhnya berhasil memosisikan masyarakat sebagai mitra dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, melainkan masih cenderung menjadikan warga sebagai objek atau simbol partisipasi semata. Hal ini mengindikasikan bahwa arah dan tujuan program Smart City belum tersampaikan secara jelas dan inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam konsep Smart City bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli, kegagalan menjadikan warga sebagai co-creators dalam proses digitalisasi kota akan menyebabkan smart city menjadi proyek elit yang hanya melayani kelompok tertentu dan memperluas kesenjangan sosial (Leclercq & Rijshouwer, 2022; Leino & Puumala, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan masih terbatasnya

akses informasi, minimnya kanal interaksi, serta belum optimalnya strategi komunikasi publik yang digunakan pemerintah Kota Makassar.

Lebih lanjut, masyarakat menyampaikan bahwa mereka belum sepenuhnya mengetahui bagaimana program Smart City dapat berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Kurangnya transparansi dan sosialisasi menjadikan partisipasi masyarakat bersifat simbolik dan tidak berdampak signifikan terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dalam konteks ini, pendekatan top-down masih mendominasi, padahal berbagai studi telah menunjukkan bahwa partisipasi yang bersifat bottom-up atau kolaboratif jauh lebih efektif dalam meningkatkan legitimasi kebijakan dan kepuasan warga. (Chan et al., 2022)

Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar perlu mengevaluasi dan memperkuat strategi partisipatif melalui pendekatan yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis komunitas. Upaya seperti forum dialog warga, sistem pelaporan digital partisipatif, dan kolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil merupakan beberapa bentuk mekanisme yang terbukti mampu meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan kota (De Weger et al., 2022). Komunikasi digital yang terbuka, transparan, dan interaktif sangat penting dalam mengaktifkan peran warga sebagai mitra strategis dalam pengembangan kota cerdas.

7. Variabel X₇(Delegated)

Berikut tabel hasil dari kuesioner yang telah dibagikan dan skoring skala licker pada pertanyaan pertama dengan variabel X₇(Delegated).

Tabel 11. Hasil Kuesioner Variabel X₇ (Delegated) dan Skoring Skala Licker

X ₇ =(Delegated)	Hasil Kuesioner	Skor Skala Licker	Total Skor Skala Licker
Sangat Sering	4	5	20
Sering	4	4	16
Netral	6	3	18
Pernah Sekali	4	2	8
Tidak Pernah		1	
Sama Sekali	82		82
Jumlah	100	-	144

Sumber: Hasil Kuesioner Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, pertanyaan kedua pada kuesioner dengan variabel X₇ (Delegated) yang berisi pertanyaan untuk mengetahui apakah masyarakat pernah diberi kewenangan oleh pemerintah dalam penentuan kebijakan terkait konsep “Smart City” di Kota Makassar, terlihat bahwa:

- a) Sebanyak 4% responden menjawab sering dengan skor 20. Artinya ada sedikit dari responden yang merasa sering diberi kewenangan oleh pemerintah dalam penentuan kebijakan terkait Smart City di Kota Makassar.
- b) Sebanyak 4% responden menjawab sering dengan skor 16. Sedikit dari jumlah responden yang sering

walau tidak rutin diberi kewenangan oleh pemerintah.

- c) Sebanyak 6% responden menjawab netral dengan skor 18. Sedikit dari responden merasa tidak yakin pernah diberi kewenangan atau tidak memiliki pengalaman yang jelas terkait kewenangan dalam kebijakan Smart City.
- d) Sebanyak 4% responden menjawab pernah sekali dengan skor 8. Sedikit dari responden merasa pernah sekali terlibat dan diberi kewenangan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait Smart City di Kota Makassar.
- e) Sebanyak 82% responden menjawab tidak pernah sama sekali dengan skor 82. Sebagian besar masyarakat merasa tidak pernah sama sekali diberi kewenangan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan Smart City di Kota Makassar.

Dengan hampir dari seluruh responden menjawab tidak pernah, maka hal ini menunjukkan bahwa mayoritas dari masyarakat belum pernah diberi delegasi kewenangan oleh pemerintah dalam penentuan kebijakan terkait Smart City di Kota Makassar. Ditambah dengan total skor skala licker 144 yang menunjukkan sangat rendah.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan Smart City di Kota Makassar mencerminkan minimnya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan strategis. Pemerintah belum memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berdaya dalam proses tata kelola, terutama dalam tahap formulasi dan implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya dominasi pendekatan top-down yang kurang mengakomodasi prinsip inklusivitas dan kolaborasi dalam pemerintahan digital.

Dalam konteks pembangunan kota cerdas, partisipasi masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada keterlibatan simbolik, melainkan harus mengarah pada empowerment warga sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi arah kebijakan. Menurut beberapa peneliti, keberhasilan Smart City sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk membangun mekanisme kolaboratif yang memberikan ruang bagi warga untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan secara bermakna (El-Sherif & Khalil, 2022; Mills et al., 2021). Hal ini hanya dapat dicapai jika terdapat transparansi informasi, keterbukaan akses teknologi, dan kemauan politik dari pemerintah untuk berbagi kendali dalam proses tata kelola.

Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat juga menjadi prasyarat penting agar partisipasi warga tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga substantif. Peningkatan literasi digital, penyediaan kanal komunikasi interaktif, serta pembangunan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kualitas partisipasi publik. Sebagaimana dinyatakan oleh beberapa penelitian, pendekatan smart governance menuntut

keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui proses yang transparan, kolaboratif, dan berbasis data. Tanpa elemen-elemen tersebut, kebijakan Smart City berisiko menjadi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. (Gohari et al., 2020; Dey & Roy, 2021)

Oleh karena itu, diperlukan transformasi dalam kerangka kerja kebijakan Smart City Kota Makassar, dari yang semula berpusat pada teknologi dan pemerintah, menuju model yang lebih berorientasi pada manusia (human-centered) dan berbasis komunitas. Perubahan ini harus disertai dengan komitmen politik yang kuat untuk mengubah relasi kuasa antara pemerintah dan warga menuju kemitraan yang sejajar dan saling memberdayakan.

8. Variabel X₈ (*Power*)

Berikut tabel hasil dari kuesioner yang telah dibagikan dan skoring skala licker pada pertanyaan pertama dengan variabel X₈ (*Power*).

Tabel 12. Hasil Kuesioner Variabel X₈ (*Power*) dan Skoring Skala Licker

X ₈ = (<i>Power</i>)	Hasil Kuesioner	Skor Skala Licker	Total Skor Skala Licker
Sangat Sering	2	5	10
Sering	5	4	20
Netral	18	3	54
Pernah Sekali	2	2	4
Tidak Pernah Sama Sekali		1	
Jumlah	73		161

Sumber: Hasil Kuesioner Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, pertanyaan kedua pada kuesioner dengan variabel X₈ (*Power*) yang berisi pertanyaan untuk mengetahui apakah masyarakat pernah memiliki kontrol terhadap kinerja pemerintah terkait dengan kebijakan konsep “Smart City” di Kota Makassar, terlihat bahwa:

- Sebanyak 2% responden menjawab sangat sering dengan skor 10. Sangat sedikit dari responden yang merasa berkuasa dalam pengambilan keputusan terkait Smart City di Kota Makassar.
- Sebanyak 5% responden menjawab sering dengan skor 20. Sedikit dari responden yang merasa cukup sering memiliki kuasa terkait keputusan dalam Smart City.
- Sebanyak 18% responden menjawab netral dengan skor 54. Beberapa responden merasa tidak yakin memiliki atau tidak memiliki kekuasaan terkait keputusan Smart City di Kota Makassar.
- Sebanyak 2% responden menjawab pernah sekali dengan skor 4. Sedikit dari responden menjawab hanya pernah sekali memiliki kontrol terkait Smart City.
- Sebanyak 73% responden menjawab tidak pernah sama sekali dengan skor 73. Sebagian besar responden merasa tidak pernah terlibat dan merasa

memiliki kekuasaan terkait keputusan Smart City di Kota Makassar.

Dengan mayoritas dari responden menjawab tidak pernah sama sekali memiliki kuasa terkait keputusan dan kebijakan Smart City di Kota Makassar, maka hampir sebagian besar masyarakat belum pernah terlibat sebagai pemegang kuasa atau kontrol dalam Smart City.

Hal ini menunjukkan dengan total skor skala licker 161 yang berarti sangat rendah dalam tangga partisipasi, berarti menunjukkan sebagian besar masyarakat hanya menjadi penerima kebijakan, bukan pembentuknya. Sehingga pemerintah perlu melakukan pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif dimana masyarakat tidak hanya didengar, tapi juga dilibatkan secara langsung dan memiliki pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan pemerintah dalam program Smart City. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan bersama yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat.

9. Tingkat Partisipasi, Masyarakat dalam Mewujudkan Kebijakan Konsep Smart, City di Kota Makassar menurut Hasil Jumlah Skor Skala Licker

Setelah menghitung dengan skor skala licker terkait masing-masing jawaban masyarakat pada kuesioner yang telah diberikan, selanjutnya diakumulasi jumlah skor skala licker seluruh variabel dan dihitung dengan analisis skoring untuk mengukur pada tingkat mana partisipasi masyarakat di Kota Makassar terkait perwujudan kebijakan konsep Smart City.

Tabel 13. Total Jumlah Skoring Skala Licker

Variabel	Jumlah Skor Skala Licker
X ₁ = Manipulation	273
X ₂ = Therapy	278
X ₃ = Informing	270
X ₄ = Consultation	211
X ₅ = Placation	197
X ₆ = Partnership	216
X ₇ = Delegated	144
X ₈ = Power	161
Total	1750

Sumber: Hasil Kuesioner Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, total dari jumlah skor skala licker masing-masing variabel adalah 1750. Selanjutnya dilakukan perhitungan menurut analisis skoring untuk menentukan tingkatan partisipasi masyarakat Kota Makassar terkait perwujudan kebijakan konsep Smart City.

Tabel 14. Interval Skor Variabel

Interval Skor Ideal	Tingkat Partisipasi	Skor Hasil Gabungan
0-170	Sangat Rendah	-
171-340	Rendah	-
341-510	Netral	-
511-680	Tinggi	-
680>	Sangat Tinggi	-
Presentase skor gabungan hasil penelitian terhadap skor gabungan ideal		<i>Skor Hasil Gabungan</i>
		680
		× 100

Sumber: Teori Arnstein dan Skor Skala Licker

Persentase skor gabungan skala licker

$$= \frac{1750}{680} \times 100 = 257$$

Tabel 15. Tingkat Kualitas Partisipasi

Tingkat Pembagian Kekuasaan	Ukuran Tingkat Partisipasi
<i>Non-Participation</i>	Rendah
<i>Tokenisme</i>	Sedang
<i>Citizen Power</i>	Tinggi

Sumber: Teori Arnstein Tangga Partisipasi

Berdasarkan hasil analisis skoring dengan total persentase sebesar 257, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Makassar dalam perwujudan kebijakan Smart City berada pada kategori rendah, tepatnya pada level non-participation dalam kerangka Ladder of Citizen Participation oleh Arnstein. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga belum memperoleh ruang atau kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, maupun pelaksanaan kebijakan Smart City. Masyarakat cenderung diposisikan sebagai objek, bukan sebagai subjek dalam tata kelola kota cerdas.

Hasil skor tertinggi justru ditemukan pada dua level terbawah dalam model Arnstein, yaitu Manipulation dan Therapy. Kedua level ini termasuk dalam kategori non-participation, yang pada dasarnya mencerminkan bentuk partisipasi semu yang bertujuan untuk membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan kebijakan, bukan untuk benar-benar melibatkan mereka dalam proses substantif. Ini sejalan dengan temuan beberapa peneliti, yang menyatakan bahwa banyak implementasi Smart City di negara berkembang masih bersifat simbolik dan tidak mengedepankan partisipasi warga secara otentik (Przybilowicz et al., 2020; Bornholdt et al., 2021).

Keterlibatan masyarakat dalam bentuk konsultasi atau pemberian informasi belum dapat dianggap sebagai bentuk pemberdayaan (empowerment). Partisipasi semacam ini masih berada dalam ruang kendali pemerintah, bukan sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah dan warga (Sánchez-Tortolero et al., 2019). Oleh karena itu, strategi partisipatif yang diterapkan perlu direformulasi agar mendorong keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai mitra aktif dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan Smart City.

Untuk mendorong pencapaian partisipasi masyarakat ke tingkat Citizen Power (yaitu Partnership, Delegated Power, dan Citizen Control), Pemerintah Kota Makassar perlu membangun ekosistem partisipasi yang inklusif, transparan, dan berbasis kolaborasi. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyediaan kanal digital partisipatif, penguatan literasi digital, forum warga daring/luring, dan pemberian kewenangan langsung kepada masyarakat dalam perumusan kebijakan lokal. Sebagaimana disarankan oleh beberapa penelitian, keberhasilan Smart City sangat bergantung pada seberapa besar pemerintah bersedia membuka ruang berbagi kekuasaan kepada

warganya melalui pendekatan co-creation dan co-governance. (Wijaya et al., 2019; Castelnovo & Romanelli, 2021).

Dengan demikian, transformasi pendekatan dari top-down menjadi bottom-up tidak hanya merupakan pilihan strategis, tetapi juga keharusan normatif untuk memastikan bahwa kebijakan Smart City di Kota Makassar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kesimpulan dan Saran

Meskipun Kota Makassar telah mengadopsi konsep Smart City selama lebih dari satu dekade, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari implementasi kebijakan tersebut. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan kebijakan Smart City masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil analisis skoring yang memperoleh nilai 257, partisipasi masyarakat dikategorikan dalam level non-participation, yang berarti sebagian besar warga belum memperoleh ruang yang memadai untuk terlibat secara aktif dan bermakna. Keterlibatan yang ada umumnya bersifat simbolis, terbatas pada penyampaian informasi atau konsultasi tanpa mekanisme yang menjamin pengaruh nyata masyarakat terhadap kebijakan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam strategi pelibatan warga agar implementasi Smart City benar-benar inklusif, transparan, dan berbasis kolaborasi, sesuai dengan prinsip tata kelola kota cerdas yang berkelanjutan.

Penelitian ini tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan yang perlu dicermati sebagai refleksi untuk pengembangan riset di masa mendatang. Kelebihan dari penelitian ini terletak pada penggunaan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat Kota Makassar. Hal ini memungkinkan diperolehnya gambaran terkini dan kontekstual mengenai tanggapan masyarakat terhadap implementasi kebijakan Smart City, sehingga hasil yang diperoleh bersifat relevan dan akurat dalam menggambarkan kondisi pada saat penelitian dilakukan. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan, salah satunya adalah fokus penelitian yang hanya mengandalkan tanggapan masyarakat umum sebagai responden, tanpa melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) utama seperti aparatur pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil yang juga memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan Smart City. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan berbagai aktor dan stakeholder terkait guna memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif serta memperkuat validitas hasil penelitian. Selain itu, cakupan sampel juga perlu diperluas agar dapat merepresentasikan populasi masyarakat Kota Makassar secara lebih proporsional. Di sisi lain, hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, sehingga dibutuhkan langkah strategis dari pemerintah untuk membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif dan kolaboratif. Masyarakat pun perlu meningkatkan kesadaran kritis dan kepeduliannya terhadap kebijakan Smart City, agar tercipta hubungan timbal balik yang produktif antara pemerintah dan warga dalam mewujudkan kota yang cerdas, partisipatif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Bornholdt, H., Robert, K., & Kisters, P. (2021, August 1). Accessing Smart City Services in Untrustworthy Environments via Decentralized Privacy-Preserving Overlay Networks. *Service Oriented Software Engineering*.
- Cai, M., Kassens-Noor, E., Zhao, Z. Y., & Colbry, D. (2023). Are smart cities more sustainable? An exploratory study of 103 U.S. cities. *Journal of Cleaner Production*.
- Castelnovo, W., & Romanelli, M. (2021). Power Relationships in the Co-production of Smart City Initiatives. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47539-0_22
- Chan, Y. E., Krishnamurthy, R., Mann, J., & Sabherwal, R. (2022). Public Participation in Policy Making: Evidence from a Citizen Advisory Panel. *Public Performance & Management Review*.
- Cheah, C. W., Koay, K. Y., & Xiang, K. (2023). Uncovering the Voices of Marginalized Minorities in Public Policy Research - A Critical Review of the Image and Text-Based Vignette Method. *The International Journal of Qualitative Methods*.
- De Weger, E., Drewes, H. W., van Vooren, N. J. E., Luijkx, K., & Baan, C. A. (2022). Engaging citizens in local health policymaking. A realist explorative case-study. *PLOS ONE*.
- Dey, P., & Roy, S. (2021). Governance in Smart City: An Approach Based on Social Network.
- El-Sherif, D. M., & Khalil, E. E. (2022). Policy instruments for facilitating smart city governance.
- El-Sherif, D. M., & Khalil, E. E. (2022). Training smart city workforces with a wide range of electronic and digital technologies.
- Erza, O., Suparmoko, M., & Tambunan, T. T. H. (2022). Development of smart governance measurement framework to create a sustainable bandung smart city. <https://doi.org/10.56107/penanomics.v1i1.16>
- Gohari, S., Ahlers, D., Fladvad Nielsen, B., & Junker, E. (2020). The Governance Approach of Smart City Initiatives. Evidence from Trondheim, Bergen, and Bodø.
- Jang, S., & Gim, T.-H. T. (2022). Considerations for Encouraging Citizen Participation by Information-Disadvantaged Groups in Smart Cities. *Sustainable Cities and Society*.
- Kędra, A., Maleszyk, P., & Visvizi, A. (2023). Engaging citizens in land use policy in the smart city context. *Land Use Policy*.
- Kundu, D., & Pandey, A. (2020). World Urbanisation: Trends and Patterns. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3738-7_2
- Leclercq, E., & Rijshouwer, E. (2022). Enabling citizens' Right to the Smart City through the co-creation of digital platforms. *Urban Transformations*.
- Legard, S. (2022). The Impact of Digital Participation on Democratic Urban Governance. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99940-7_8
- Leino, H., & Puunala, E. (2021). What can co-creation do for the citizens? Applying co-creation for the promotion of participation in cities:
- Martynova, S. E. (2020). Participative Adoption of Urban Decisions: Legal Expectations of Citizens. <https://doi.org/10.18572/1813-1247-2020-12-50-56>
- Mills, D. E., Izadgoshasb, I., & Pudney, S. (2021). Smart City Collaboration: A Review and an Agenda for Establishing Sustainable Collaboration. *Sustainability*.
- Nyaranga, M. S., Hao, C., & Hongo, D. O. (2022). The Role of Public Participation in Governance towards Achieving Sustainable Development. Part 2. *Vestnik Rossijskogo Universiteta Družby Narodov*.
- Pahlavani, P. (2022). Digital Governance for Smart City and Future Community Building: From Concept to Application.
- Pate, A., Emsley, R., Sperrin, M., Martin, G. P., & van Staa, T. (2020). Impact of sample size on the stability of risk scores from clinical prediction models: a case study in cardiovascular disease.
- Prastyo, I. Y., Warsono, H., & Herawati, A. R. (2022). Exploring the Community Involvement in Smart City through a Co-creation Approach in Indonesia. <https://doi.org/10.56225/jmsc.v1i2.130>
- Przebylowski, E., Cunha, M. A., Geertman, S., Leleux, C., Michels, A., Tomor, Z., Webster, C. W., & Meijer, A. (2020). Citizen Participation in the Smart City: Findings from An International Comparative Study. *Local Government Studies*.
- Rodríguez Bolívar, M. P., Alcaide Muñoz, L., & Alcaide Muñoz, C. (2022, October 4). Modelling strategic planning practices considering socially vulnerable groups in smart cities. *International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*.
- Sánchez-Tortolero, R., Márquez-González, J., & Vérnaez-Hernández, G. (2019, April 3). Participation and Citizen Empowerment platform for e-governance: Communal Integration System (SINCO). *International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*.
- Saputra, D. P. D., Kismartini, K., Dwimawanti, I. H., & Afrizal, T. (2022). Mewujudkan Semarang Hebat melalui Smart City (Studi Kasus pada Dimensi Smart Economy Kota Semarang). *Perspektif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Sundberg, L., & Gidlund, K. L. (2022, October 4). Dimensions of e-Participation: Levels of Participation and Citizen Configurations. *International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*.
- Wahyuni, S., Handayani, E., & Yanuarto, W. N. (2022). The Perception and Public Participation: The Government Implementation of Independent

Learning Program in Indonesia. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences.
Wijaya, A. A. M., Sa'ban, L. M. A., & Mayunita, S. (2019, October 18). Collaborative governance to evolve smart city in local governments.